

UPAYA PENINGKATAN POPULASI SAPI BETINA PRODUKTIF DI INDONESIA



Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
2008

UPAYA PENINGKATAN POPULASI SAPI BETINA PRODUKTIF DI INDONESIA

Penyusun

: Ismeth Inounu
Kusuma Diwyanto
Subandriyo
Budi Haryanto
Atien Priyanti
Eny Martindah
Ratna Ayu Saptati

Diterbitkan oleh

: Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan
Jl. Raya Pajajaran Kav.E-59
Bogor, 16151
Telp. (0251) 8322185
Fax (0251) 8328382 ; 8380588
Email: criansci@indo.net.id

ISBN 978-979-8308-96-3

**Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian
Bogor, 2008**

UPAYA PENINGKATAN POPULASI SAPI BETINA PRODUKTIF DI INDONESIA

Hak Cipta @2008. Pusat Penelitian dan Pengembangan
Pernakan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Pernakan

Jl. Raya Pajajaran Kav.E-59

Bogor, 16151

Telp. : (0251) 8322185

Fax : (0251) 8328382 ; 8380588

Email : criansci@indo.net.id

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Upaya Peningkatan Populasi Sapi Betina Produktif di
Indonesia / Ismeth Inounu dkk. – Bogor: Pusat
Penelitian dan Pengembangan Pernakan, 2007: vi + 41
hlm; illus.; 16 cm.

ISBN 978-979-8308-96-3

1. Sapi Betina Produktif	2. Populasi
I. Judul; II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pernakan;	
III. Inounu, I	636.2

KATA PENGANTAR

Peningkatan jumlah populasi ternak sapi merupakan target utama yang harus dilaksanakan dalam rangka mendukung program percepatan swasembada daging sapi (P2SDS) di Indonesia. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah upaya meningkatkan populasi sapi betina produktif dengan berbagai cara. Undang-undang No.6/67 tentang 'Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan' melarang untuk dilakukan pemotongan ternak sapi betina produktif, namun implementasinya perlu diikaji ulang karena menjadi kontra produktif dengan kondisi yang ada di lapang saat ini. Peningkatan jumlah populasi ternak sapi betina ini memang tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek, tetapi harus secara bertahap dan dalam jangka panjang dengan program yang jelas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Tim Analisis Kebijakan Puslitbang Peternakan telah menyusun konsep awal upaya peningkatan populasi sapi betina produktif di Indonesia. Hal ini dilaksanakan melalui kegiatan *desk study* dan lokakarya bekerjasama dengan Ditjen Peternakan dan Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI) di Jakarta, tanggal 21 April 2008. Berbagai pelaku usaha dan instansi terkait ikut terlibat dalam kegiatan ini seperti pengambil kebijakan, akademisi, peneliti, asosiasi dan organisasi profesi serta praktisi usaha sapi potong. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan usaha sapi potong di Indonesia, utamanya dalam mewujudkan swasembada daging sapi.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya dokumen ini. Buku ini merupakan dokumen dinamis yang dirasakan masih jauh dari sempurna, sehingga masukan dan saran yang bermanfaat guna meningkatkan kualitas sangat diharapkan. Semoga buku ini dapat berguna bagi para pembaca

untuk implementasi program usaha sapi potong lebih lanjut di masa-masa yang akan datang.

Bogor, Juli 2008
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengembangan Peternakan

Dr. Abdullah M. Bamualim

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Pendahuluan	1
Tahapan Kegiatan	6
Upaya Peningkatan Populasi Sapi Betina Produktif	8
Sasaran	8
Implementasi Peningkatan Populasi Sapi Betina Produktif: dalam negeri dan impor	9
Upaya Tindak Lanjut	14
Matriks Rencana Tindak Upaya Peningkatan Populasi Sapi Betina Produktif di Indonesia	17
Daftar Bacaan	22
Tim Perumus	24
Lampiran	25
1. Berbagai upaya meningkatkan populasi sapi betina produktif untuk bibit oleh Prof. (R) Dr. Sjamsul Bahri ...	26
2. Menambah populasi ternak sapi potong di Indonesia oleh Ir. Dicky Adiwoso, MBA	28

3. Peluang dan tantangan impor sapi bibit dari negara-negara lain sebagai alternatif pemenuhan ketersediaan sapi potong oleh Dr. M. Malole 30
4. Peluang bisnis tunda potong melalui pola kemitraan usaha oleh Ir. Rochadi Tawaf, MS 32
5. Pembahasan upaya peningkatan populasi sapi betina produktif di Indonesia oleh Prof. Dr. Ir. Harimurti Martojo 34
6. Pembahasan upaya peningkatan populasi sapi betina produktif di Indonesia oleh Dr. Drh. Hasim, DEA 38

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, populasi sapi potong di Indonesia tidak menunjukkan perkembangan yang signifikan, bahkan pada periode 1997-2001 populasinya cenderung terus menurun. Saat ini diperkirakan populasi sapi potong sebesar 11,3 juta ekor (Ditjenak, 2007), dan hanya sekitar 3,5 juta ekor diantaranya adalah sapi betina produktif (SBP). Pulau Jawa merupakan wilayah yang paling padat populasi sapi, disamping Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali. Di kawasan ini ketersediaan pakan sangat terbatas, karena hampir tidak ada lahan pertanian yang dapat dipergunakan untuk menggembalakan sapi, kecuali di beberapa wilayah propinsi NTT dan NTB. Sebaliknya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua yang wilayahnya sangat luas, relatif masih kosong ternak, disamping itu masih ada pulau-pulau kecil yang juga belum termanfaatkan untuk pengembangan usaha peternakan.

Perkembangan populasi sapi potong yang relatif lambat diantaranya disebabkan oleh: (i) rendahnya produktivitas ternak dari aspek mutu genetik yang tidak dapat diketahui dengan pasti karena kelangkaan data atau parameter fenotipik maupun genetik tentang sapi-sapi lokal dan persilangannya, serta (ii) tidak adanya upaya perbaikan daya dukung wilayah sumber pakan ternak, bahkan cenderung menurun. Hal ini diakibatkan oleh semakin sempitnya luas areal pertanian, turunnya kualitas padang penggembalaan akibat degradasi dan pertumbuhan gulma, peraturan daerah yang menghambat pemanfaatan padang penggembalaan secara komunal maupun perubahan iklim/cuaca yang tidak menentu. Menurunnya populasi sapi diduga disebabkan karena jumlah pemotongan dan pengeluaran

sapi dari daerah-daerah sumber sapi lebih besar dari angka pengeluaran yang dapat dihitung berdasarkan populasi konstan atau estimasi pertambahan populasi per tahun.

Sebagian besar SBP dipelihara peternak kecil dengan skala 1-4 ekor per KK dalam suatu sistem usaha tani untuk kegiatan *cow-calf operation*. Usaha ini menghasilkan pedet atau sapi bakalan, disamping untuk menghasilkan kompos. Alasan memelihara SBP bukan dengan pertimbangan bisnis atau ekonomi, tetapi karena untuk keperluan tabungan, akumulasi aset, asuransi, atau untuk memanfaatkan sumberdaya yang ada secara optimal (tenaga, limbah pertanian, padang pangan, atau hijauan pakan ternak). Peternak pada umumnya tidak mengusahakan sapi secara komersial yang berbasis keuntungan karena masih mempunyai pandangan/sikap yang menganggap bahwa ternak dapat dimanfaatkan tanpa harus menanamkan modal. Dalam hal ini peternak masih sebatas sebagai *user* dan akan meningkat menjadi *keeper* apabila menyikapi sebagai peternak pemelihara karena telah menyediakan kandang maupun memberi pakan seadanya. Kondisi peternak sebagai *producer* apalagi *breeder* masih sangat jarang dilakukan di Indonesia.

Memelihara sapi oleh sebagian besar peternak dianggap sebagai kesempatan untuk memperoleh pekerjaan (*opportunity*) yang diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi (*benefit*). Sebagai *user*, pendapatan dari pemeliharaan sapi tidak pernah dipersoalkan karena peternak memang tidak berorientasi keuntungan dan hampir tidak pernah memperhitungkan biaya pakan atau tenaga kerja. Namun, dengan naiknya harga daging sapi akhir-akhir ini diharapkan manfaat ekonomi yang diperoleh peternak juga dapat meningkat.

Saat ini rata-rata konsumsi daging sapi per kapita masyarakat sekitar 1,7-1,8 kg per tahun, dan terjadi distribusi yang tidak merata. Penduduk perkotaan mengkonsumsi jauh

lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pedesaan. Dengan jumlah penduduk sebesar 223 juta pada pertengahan tahun 2007 dan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,5 persen, serta dibarengi dengan perkembangan ekonomi dan perubahan gaya hidup maupun pola makan penduduk perkotaan akan menyebabkan konsumsi daging sapi terus bertambah. Elastisitas harga daging sapi yang lebih besar dari satu menunjukkan bahwa produk ini termasuk barang 'lux' dengan tingkat konsumsi terbesar di wilayah Jabodetabek. Oleh karena itu hampir semua produsen sapi (NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY) mengirim sapi potong ke wilayah konsumen di Jabodetabek. Impor daging dan sapi hidup pun terutama ditujukan untuk memenuhi permintaan penduduk di wilayah itu. Elastisitas pendapatan terhadap permintaan daging sapi sebaiknya dikelompokkan atas penduduk di pedesaan dan perkotaan yang terdiri dari kelompok berpendapatan rendah, sedang dan tinggi sesuai dengan kriteria Susenas. Hal ini sudah dikaji dengan menggunakan data dasar sampai dengan tahun 1990, dimana dengan banyaknya perubahan lingkungan yang telah terjadi memerlukan *updated* informasi.

Pencatatan baik kuantitatif dan kualitatif secara periodik pada kawasan sumber ternak, seperti NTT, NTB, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY, perlu dilakukan karena sebagian besar sapi jantan dijual ke Surabaya, Jakarta, Jawa Barat dan Banten atau Kalimantan. Hal ini dilakukan dalam upaya evaluasi kesesuaian laju pengeluaran sapi jantan dari wilayah sumber atau akibat *market driven* terkait dengan PAD Pemda setempat. Jagal rumah potong hewan (RPH) di wilayah sumber ternak ini kesulitan memperoleh sapi siap potong, sehingga banyak SBP dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging penduduk setempat. Pelarangan pematangan sapi betina produktif dan pengantar-pulau sapi bibit menyebabkan harga SBP lebih

rendah dibandingkan dengan sapi jantan. Kondisi ini menyebabkan pemotongan SBP di Indonesia sangat besar, diperkirakan sekitar 200-300 ribu ekor pertahun. Dengan demikian pelarangan pemotongan SBP tanpa memperhatikan adanya surplus SBP di wilayah sumber bibit disertai dengan pengawasan, konsistensi, insentif dan alternatif jalan keluar secara nasional justru menjadi kontra produktif.

Di beberapa daerah, sebagian pengusaha jagal justru menyukai ternak dengan ukuran kecil, karena pertimbangan bisnis dan efisiensi. Kondisi ini menyebabkan banyak sapi dipotong dengan bobot badan dibawah potensi genetiknya, yaitu sekitar 70-80 persen dari potensi bobot badan optimum. Permintaan *veal* (daging pedet) di kota besar juga menyebabkan pengurusan sapi lebih dipercepat. Dua hal tersebut perlu diatasi dengan kebijakan disinsentif, misalnya retribusi ternak kecil yang lebih tinggi dibandingkan pemotongan ternak dengan ukuran besar, dan kebijakan insentif bagi peternakan rakyat yang mengelola usaha perbibitan. Insentif yang diperlukan bersifat merangsang pengembangan usaha, misalnya suku bunga kredit komersial dibawah 5 persen dan insentif berdasarkan pertambahan bobot badan sapi bagi peternak di kawasan *village breeding centre* (VBC).

Impor adalah alternatif jangka pendek yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daging di dalam negeri. Namun dalam dua dasawarsa terakhir ini terjadi kecenderungan impor daging dan sapi bakalan yang terus meningkat. Pada tahun 2007 impor sapi telah mencapai sekitar 520 ribu ekor, dan impor daging dan jerohan diperkirakan sekitar 50-70 ribu ton. Perbandingan impor daging dan jerohan lebih banyak jerohan, bahkan disinyalir mencapai sekitar 60-70 persen. Menurut perhitungan, impor daging, jerohan dan sapi bakalan telah mencapai 30 persen dari kebutuhan daging nasional. Idealnya

(target yang pernah dicanangkan dengan 'gaung Lampung'), pasokan daging di dalam negeri dipasok dari kombinasi sapi yang berasal dari peternakan lokal (90 persen), ternak penggemukan eks-impor (9 persen) dan daging atau jerohan impor (1 persen). Dengan demikian, meningkatkan jumlah SBP dari sisi populasi, kinerja dan mutu genetik harus menjadi target utama untuk mewujudkan swasembada daging sapi, selain kebijakan pengaturan (insentif atau disinsentif) impor bibit, sapi bakalan, daging maupun jerohan.

TAHAPAN KEGIATAN

Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Peternakan melalui tim Analisis Kebijakan telah melakukan *desk study* terkait dengan upaya penyelamatan SBP, dimana hasil dari studi ini dilanjutkan dalam suatu lokakarya. Bekerjasama dengan Ditjen Peternakan dan Perhimpunan Ilmu Pemuliaan Indonesia (PERIPI) Puslitbang Peternakan telah melaksanakan Lokakarya dengan tema 'Upaya Peningkatan Populasi Sapi Betina Produktif di Indonesia' pada tanggal 19 April 2008 di Jakarta. Lokakarya ini diselenggarakan seiring dengan pelaksanaan Pekan Promosi Susu Nasional untuk memperingati Hari Kartini dan dalam rangka mendukung serta mewujudkan program pemerintah pada Percepatan Swasembada Daging Sapi Tahun 2010. Lokakarya ini bertujuan untuk menggali informasi dan sekaligus merumuskan langkah-langkah kebijakan yang operasional dalam mendukung program pembangunan sapi potong di Indonesia. Acara ini dihadiri oleh sekitar 60 peserta terdiri dari penentu kebijakan di tingkat pusat maupun daerah seperti: pejabat terkait lingkup Ditjen Peternakan, pejabat Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Merauke; akademisi dan peneliti lingkup Badan Litbang Pertanian (Puslitbang Peternakan, BPTP NTT, BPTP Bengkulu), anggota PERIPI serta pelaku usaha yang tergabung dalam PPSKI dan APFINDO. Lokakarya ini dibuka oleh Kepala Puslitbang Peternakan, Dr. Abdullah M. Bamualim dan dipandu oleh Dr. Ismeth Inounu selaku penanggung jawab kegiatan Analisis Kebijakan Komoditas Peternakan.

Nara sumber dalam lokakarya ini adalah:

1. Prof. (R) Dr. Syamsul Bahri, Sekretaris Ditjen Peternakan dengan topik bahasan: Berbagai upaya peningkatan populasi sapi potong betina produktif untuk bibit
2. Ir. Dicky Adiwoso, MBA, pengusaha dengan topik bahasan: Menambah populasi ternak sapi potong di Indonesia
3. Dr. M. Malole, pakar kesehatan hewan dari IPB dengan topik bahasan: Peluang dan tantangan impor sapi bibit dari negara-negara lain sebagai alternatif pemenuhan ketersediaan sapi potong.

Pembahas pada acara ini terdiri dari:

1. Prof. Dr. Harimurti Martojo dari IPB yang disampaikan secara tertulis
2. Prof. Dr. H. Soehadji, pengamat peternakan dan mantan Dirjen Peternakan
3. Dr. Drh. Hasim, DEA, dekan Fakultas MIPA, IPB
4. Ir. Rochadi Tawaf, MS., wakil Dekan Fakultas Peternakan UNPAD dan Sekjen PPSKI.

Beberapa butir hasil diskusi dan rekomendasi yang dikombinasikan dengan hasil *desk study* diharapkan dapat dipergunakan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan instansi terkait lainnya dalam rangka mempertajam program-program kerja serta kebijakan terkait dengan upaya untuk meningkatkan populasi sapi betina produktif di Indonesia.

UPAYA PENINGKATAN POPULASI SAPI BETINA PRODUKTIF

SASARAN

1. Mengupayakan peningkatan populasi SBP dalam rangka mendukung terwujudnya P2SDS. Hal ini bertujuan untuk: (a) meningkatkan populasi ternak sapi potong melalui optimalisasi (memperpanjang) usianya dan dapat menjadi peluang bisnis tunda potong melalui pola kemitraan usaha, (b) memanfaatkan sumber daya genetik dan pakan lokal dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan, dan (c) memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
2. Mengurangi ketergantungan terhadap impor sapi bakalan serta jerohan dan daging sapi yang cenderung terus meningkat dari tahun ke tahun sehingga menguras devisa negara yang cukup besar.

IMPLEMENTASI PENINGKATAN POPULASI SAPI BETINA PRODUKTIF: DALAM NEGERI DAN IMPOR

Tingkat pemotongan SBP saat ini mencapai 150-200 ribu ekor per tahun, walaupun beberapa sumber lain memperkirakan dapat mencapai 200-300 ribu ekor per tahun. Undang-undang No.6/67 tentang 'Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan' melarang untuk dilakukan pemotongan ternak SBP, namun ternyata implementasi dan instrumen dalam pelaksanaan UU ini justru kontra produktif, sehingga perlu dikaji ulang dan dalam realisasinya harus dilakukan dengan konsisten, berkesinambungan serta didukung dengan *law enforcement* serta insentif dan alternatif jalan keluarnya. Pelarangan pemotongan SBP tanpa insentif yang tepat ternyata mempunyai efek negatif terhadap populasi ternak sapi betina. Karena sulit dijual sebagai ternak potong (harus melanggar peraturan) sementara peternak memerlukan dana tunai, menyebabkan harga ternak betina menjadi lebih murah dibandingkan dengan sapi jantan. Sapi jantan sebagian besar dikeluarkan/dijual dari daerah sumber bibit, sehingga yang tersisa tinggal sapi betina. Kondisi ini justru mendorong pengusaha jagal untuk memilih SBP yang harganya lebih murah, disamping kenyataan bahwa SBP menjadi satu-satunya sumber daging. Pemotongan SBP terpaksa dilakukan secara ilegal, atau justru dilindungi oleh oknum aparat setempat.

Penjaringan/pembelian oleh Dinas Peternakan atau proyek serupa lainnya terhadap SBP sebagai tindakan penyelamatan induk (dan embrio/janin yang mungkin ada di dalam uterus) memberi dampak positif, karena harga SBP menjadi mahal. Untuk menyelamatkan SBP dari pisau jagal harus diupayakan agar harga SBP sama atau lebih mahal dibandingkan

dengan sapi jantan. Namun kondisi ini harus diwaspadai karena dapat berakibat terkurasnya SBP dari perdesaan karena harga yang menarik. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam tentang kebijakan penyelamatan SBP, dimana di setiap wilayah mungkin akan berbeda masalah dan tantangannya. Hal ini juga meliputi distribusi SBP terjaring ke wilayah yang berdaya tampung tinggi berdasarkan ketersediaan sumberdaya pakan dan peternaknya.

Peningkatan jumlah SBP tidak dapat dilakukan secara instan (dalam jangka pendek), tetapi harus secara bertahap (dalam jangka menengah dan jangka panjang) dengan program yang jelas. Pemindahan SBP dari satu kawasan yang sudah padat (NTT dan NTB) ke daerah baru yang berdaya tampung tinggi (Sumatera, Kalimantan, Papua, dlsb.) dapat meningkatkan jumlah ternak secara nasional. Ternak yang dipindahkan ke daerah yang jauh dari pusat konsumen dan masih kosong ternak akan berkembangbiak, karena tersedia pakan yang cukup sepanjang tahun. Program ini akan memakan waktu dan diperlukan sedikit kesabaran sehingga orientasi komersial menjadi tidak menarik. Rencana pemindahan ternak dilaksanakan melalui mekanisme *cow calf operation* berdasarkan kondisi di perdesaan yang dimulai dengan pemilihan bangsa sapi yang tepat dan dalam skala pilot untuk dapat diuji keberhasilannya apabila akan dikembangkan dengan skala yang lebih besar. Distribusi SBP antar pulau termasuk ke pulau-pulau kecil perlu didukung oleh skim pembiayaan bagi swasta dalam melakukan program *breeding*, sekaligus memberi insentif bagi daerah yang mampu memasok bibit untuk wilayah lain.

Di dalam negeri upaya untuk meningkatkan jumlah SBP juga dapat dilakukan dengan cara meningkatkan daya reproduksi sehingga dapat: (i) mempercepat umur beranak pertama, (ii) memperpendek jarak beranak, serta (iii) memperlambat *culling*

sapi yang sangat produktif. Sebaliknya *culling* juga harus dilakukan terhadap sapi betina majir dan tua yang tidak produktif, sehingga persentase kelahiran/beranak dapat meningkat. Dalam hal ini *recording* harus tertib, atau bantuan tenaga pemeriksa kebuntingan (PKB) yang berkualitas harus ditingkatkan. Ternak betina yang di*culling* diberi cap bakar "P" tanda boleh dipotong. Intensifikasi program Inseminasi Buatan dengan memanfaatkan teknologi *semen sexing* dalam upaya memperoleh pedet betina dapat dilakukan secara selektif, namun harus dibarengi dengan perencanaan yang baik dan jelas.

Untuk menambah populasi SBP juga dapat dilakukan dengan pemanfaatan sapi eks impor *Brahman cross* (BX) *betina produktif*. Namun peternak harus menyadari bahwa SBP eks impor memerlukan dukungan pakan yang baik kalau diinginkan untuk dapat bunting kembali setelah beranak pertama. Laporan dari daerah yang menyatakan sapi eks impor sulit beranak kembali mungkin disebabkan karena sapi hanya diberi pakan jerami atau limbah pertanian yang berkualitas rendah dengan penyediaan dalam jumlah terbatas. Kemungkinan lain yang perlu dijabarkan adalah bahwa sapi-sapi eks impor tersebut adalah sapi *culled* karena sebagai *first calf heifers* sudah gagal bunting pada musim kawin pertama, sehingga sudah terindikasi bermasalah reproduksinya. Sapi betina kelompok ini biasanya diberi kesempatan kedua untuk dikawinkan lagi pada musim kawin berikutnya, dan jika bunting akan dipergunakan sebagai induk dengan performa yang kurang baik. Apabila sapi ini diimpor dalam keadaan bunting, maka dengan lingkungan yang baru (mencekam, panas dan kurang pakan) akan mengakibatkan sapi-sapi ini sulit bunting kembali dan bahkan dapat majir permanen. Hal ini dikarenakan sapi-sapi betina ini memerlukan waktu yang lama untuk mengembalikan kondisi badan dan keseimbangan hormonal menuju normal (adanya interaksi antara genotipe dan

lingkungan) yang sangat menonjol ekspresinya pada sifat-sifat reproduksi.

Impor sapi sebagai *breeding stock* atau bibit sebar untuk perkembangbiakkan dapat dilakukan dengan pertimbangan yang seksama, karena jangan sampai justru menimbulkan kerugian bagi peternak karena mereka belum siap atau kesulitan pakan. Importasi sapi bibit atau untuk perkembangbiakkan lebih tepat bila dilakukan oleh swasta atau masyarakat yang selektif, sedangkan pemerintah hanya memfasilitasi atau memberi kemudahan dalam hal perijinan, kredit, dan aspek teknis lainnya.

Alasan kuat untuk melakukan pembelian sapi termasuk SBP dari Australia adalah karena faktor jaminan kesehatan (bebas PMK, BSE, dll.), jarak, ketersediaan prasarana, serta harga yang cukup kompetitif. Australia memiliki padang pangan yang sangat luas dan terpelihara secara intensif sebagai tempat hidup sapi. Keunggulan komparatif ini mengakibatkan biaya produksi sapi menjadi minimal dan kompetitif dibandingkan apabila harus impor dari negara lain. Faktor harga yang kompetitif inilah yang dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang bergerak di bidang sapi potong, untuk mengimpor sapi bakalan maupun bibit. Saat yang paling tepat untuk Indonesia mengimpor sapi dari Australia adalah saat musim kemarau antara bulan Mei sampai Oktober. Keadaan di Australia saat itu sangat kering dan pakan ternak jauh berkurang, dimana peternak berusaha keras mengeluarkan sapi dari peternakannya. Saat itu para importir dapat membeli SBP dengan harga yang murah, dan sapi-sapi yang baik ini dapat digunakan sebagai sapi bibit di Indonesia.

Ketergantungan pada satu negara pemasok adalah sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu perlu dicari alternatif lain. Peluang untuk mengimpor sapi dari negara yang belum sepenuhnya bebas PMK ke Indonesia memang ada, dengan

memanfaatkan: Art OEI No : 2.2.10.12 tentang impor dari negara terinfeksi PMK. Impor dibolehkan dengan memperhatikan:

- a. Tidak didapati tanda-tanda klinis disuatu wilayah negara yang bersangkutan
- b. Tidak ada kasus PMK selama 3 bulan dan dalam radius 10 km.
- c. Dilakukan isolasi ternak selama 30 hari sebelum pengapalan.
- d. Dilakukan uji diagnostik di negara asal secara serologis, dan biologi molekuler, untuk meyakinkan bebas virus.

Setibanya di Indonesia ternak tersebut dipelihara (dikarantina) di pulau yang terisolir, kemudian dicampur dengan hewan sentinel yang sangat peka terhadap PMK. Apabila dalam kurun waktu 3 bulan tidak ada kejadian PMK maka ternak tersebut dapat dinyatakan bersih dari PMK. Teknologi dan tenaga ahli untuk melakukan hal-hal ini sebenarnya telah tersedia di Departemen Pertanian dan lembaga yang terkait dengan kesehatan hewan lainnya yang ada di Indonesia.

Namun untuk melakukan hal tersebut, perlu mempertimbangkan aspek berlandaskan maksimum sekuriti yang mencakup: (1) analisis resiko dan manfaatnya, (2) kesiapan SDM, sarana dan prasarana, (3) kelayakan ekonomis ditinjau dari biaya transportasi, *loading* dan *unloading*, karantina, pengawasan, dlsb., (4) kesiapan moral dan fisik petugas yang harus mengawal dan melaksanakan proses yang cukup rumit ini, serta (5) faktor keamanan (jaminan terhadap lalu lintas keluar masuk wilayah) dan keberlanjutan. Pada waktu Pemerintahan Hindia Belanda memasukkan sapi Ongole ke pulau Sumba lebih satu abad yang lalu, jumlah sapi yang didatangkan hanya beberapa ribu dan pada masa itu keamanan cukup kondusif, dan sumberdaya pakan masih tersedia melimpah.

UPAYA TINDAK LANJUT

Visi dan Misi yang pernah dicanangkan Direktorat Jenderal Peternakan pada awal tahun 1990-an untuk berswasembada daging (90 persen sapi lokal, 9 persen sapi bakalan impor, dan 1 persen daging impor) masih cukup relevan, dan sesuai dengan target yang ditetapkan Departemen Pertanian saat ini. Oleh karena itu perlu dibuat *road map* lintas instansi atau antar Departemen, serta lintas daerah, untuk menjabarkan program pengembangan sapi secara nasional sampai pada tahap implementasi di daerah. *Road Map* tersebut memuat hasil kajian hingga tahapan kerja, serta model-model pengembangan, agar tahapan-tahapan yang sudah digariskan dapat terlaksana. Hal ini meliputi: (i) pengendalian pematangan SBP dan distribusi bibit sapi dari daerah padat ke daerah kosong ternak, (ii) perbaikan mutu dan penyediaan bibit, (iii) penanganan gangguan reproduksi/keswan, (iv) intensifikasi kawin alam dan IB, (v) pengembangan dan pemanfaatan pakan lokal, serta (vi) pengembangan SDM dan kelembagaan. Hal ini juga harus memasukkan jaminan pendanaan dan sumber anggaran yang berlaku sampai akhir masa program dan jaminan terealisasinya dukungan pihak-pihak yang ikut merencanakan *road map* tersebut.

Pengembangan kelompok peternak atau koperasi peternak sapi potong sangat tepat sebagai kelembagaan di tingkat operasional di perdesaan. Kelembagaan ini harus dikelola secara profesional dan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. Kelompok atau kelompok peternak ini dapat berperan pada kegiatan hulu sampai hilir, mulai penyediaan bibit dan pakan, pengelolaan ternak dan pengendalian penyakit, sampai pada pemasaran atau tataniaga. Beberapa *success story*

di daerah perlu diangkat sebagai model pengembangan sapi di Indonesia, namun harus tetap dimodifikasi sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Dalam diskusi ini teridentifikasi bahwa kelembagaan koperasi merupakan salah satu solusi terbaik untuk memecahkan hal tersebut.

Penyediaan bibit unggul harus tetap ditangani atau dikoordinasi oleh pemerintah bersama masyarakat, baik untuk tujuan pengadaan *elite bull*, ternak pengganti (*replacement stock*), maupun distribusi ternak. Pemberdayaan atau revitalisasi UPT dan UPTD Perbibitan sangat diperlukan, yang dimulai dari peningkatan kualitas SDM dalam hal teknis maupun manajemen. UPT yang mempunyai kinerja baik seperti Loka Penelitian Sapi Potong, Grati harus dijadikan acuan atau contoh (*benchmark*), sehingga ada kompetisi sehat diantara UPT yang ada. Setiap UPT harus mempunyai output jelas dan terukur, sehingga ke depan ketergantungan pada bibit impor dapat diminimalkan. Perlu dikaji usulan tentang swastanisasi UPT Perbibitan, misalnya B/BIB, agar dapat lebih mandiri dalam hal pelaksanaan usahanya tanpa melalui SOP pengadaan barang/bahan publik yang konvensional. Jaminan pengadaan dan penyediaan dana pelaksanaan program pemuliaan secara kontinu perlu diperhatikan, sehingga program tersebut tidak terputus di tengah jalan.

Masyarakat atau swasta perlu didorong untuk melakukan kegiatan perbibitan atau *cow calf operation*, dengan dukungan atau kebijakan yang lebih kondusif. Bagi pihak atau swasta yang berminat untuk mengusahakan *breeding farm* di pulau-pulau kecil perlu diberi petunjuk dan aturan yang jelas, mulai dari pemilihan atau seleksi pulau-pulau kecil yang memungkinkan sampai pada tahap pelaksanaan. Pemanfaatan pulau-pulau kecil diharapkan bukan hanya sekedar wacana, tetapi dapat benar-benar direalisasikan mulai dari kegiatan survey atau studi kelayakan sampai pemasukan ternak dan pengembangannya.

Untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil perlu persiapan yang rinci dan konkrit hingga jelas di pulau yang mana dan dukungan apa yang dibutuhkan, antara lain menyangkut (i) ketersediaan dan kepastian hukum dalam penggunaan lahan, (ii) aspek sosial-budaya masyarakat setempat, (iii) kelembagaan dan keamanan, (iv) antisipasi bila terjadi kejadian penyakit, dan (v) perhitungan atau kelayakan ekonomi dan keberlanjutan.

MATRIKS RENCANA TINDAK UPAYA PENINGKATAN POPULASI SAPI BETINA PRODUKTIF DI INDONESIA

Rencana Tindak	Keluaran	Sasaran Waktu	Penanggung Jawab
I. UPAYA PENINGKATAN SAPI BETINA PRODUKTIF			
1. Pendataan parameter fenotipik-genetik sapi lokal dan persilangannya	Perencanaan pengembangan sapi lokal dan strategi <i>breeding</i> berdasarkan parameter fenotipik-genetik sapi lokal dan persilangannya	2009 -1010	Perguruan Tinggi, Puslitbangnak, DitjenNak
2. Pendeteksian daerah-daerah surplus sapi betina produktif dan daerah-daerah surplus pakan ternak	Penyebaran sapi betina produktif dari daerah surplus ke daerah yang mempunyai daya tampung tinggi berdasarkan sumberdaya pakan dan peternaknya sehingga terjadinya percepatan pengembangan sapi lokal	2009-1010	Pemprov, Pemkab, DitjenNak
3. Peningkatan daya reproduksi sapi betina: umur beranak pertama yang cepat; jarak beranak yang pendek;	Menurunnya jumlah pemotongan sapi betina produktif	2009 - 2010	Pemprov, Pemkab, DitjenNak

memperlambat <i>culling</i> bagi sapi yang produktif			
4. Pemanfaatan sapi eks impor dan pendeteksian negara-negara surplus betina produktif	a. Peningkatan kualitas sapi potong lokal dan terkendalinya pemotongan betina produktif b. Terindikasinya negara-negara pengekspor sapi betina untuk pengembangan ternak sapi	2009 - 2010	Swasta, DitjenNak
5. Penanganan gangguan reproduksi dan kesehatan hewan	Peningkatan produktifitas sapi betina produktif	2009 - 2010	Pemprov, Pemkab, B/BBPPV DitjenNak,
6. Intensifikasi kawin alam dan IB	Peningkatan jumlah kelahiran dan memperkecil S/C dalam suatu periode	2009 - 2010	Pemprov, Pemkab, DitjenNak
7. Pengembangan dan pemanfaatan pakan lokal	a. Terjaminnya ketersediaan pakan sepanjang tahun, sehingga terjadi peningkatan kualitas reproduksi sapi betina produktif.	2009 - 2010	Pusitbangnak, Perguruan Tinggi, Koperasi, Swasta

	b. Aplikasi sistem integrasi yang lebih luas: SIPT dan SISKAS		
8. Pengembangan SDM dan kelembagaan	Pengembangan kelompok peternak atau koperasi peternak sapi potong yang dapat meningkatkan gairah usaha	2009-2010	Pemprov, Pemkab, DitjenNak, Badan SDM

II. PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL

1. Ketersediaan dan kepastian hukum dalam penggunaan lahan pulau-pulau kecil	Meningkatnya jumlah peternak swasta yang memanfaatkan pulau-pulau kecil	2009-2010	Pemprov, Pemkab, BUMN/swasta Pemth Pusat
2. Sosialisasi pengembangan usaha sapi potong untuk masyarakat setempat	Meningkatnya pengetahuan dan penerimaan masyarakat dalam usaha ternak sapi	2009-2010	Pemprov, Pemkab, Badan SDM, Swasta, Koperasi
3. Kelembagaan dan keamanan di pulau-pulau kecil	Meningkatnya kepercayaan dan peran swasta dalam usaha pengembangan ternak sapi	2009-2010	Pemprov, Pemkab, Hankam

4. Pengawasan terhadap kejadian penyakit di pulau-pulau kecil	Terkendali dan terkontrolnya ternak sapi potong dari gangguan penyakit menular	2009-2010	Pemprov, Pemkab, B/BBPPV DitjenNak
5. Perhitungan atau kelayakan ekonomi dan usaha yang berlanjut dalam memanfaatkan pulau-pulau kecil	Efisiensi usaha dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat untuk mengembangkan ternak sapi	2009-2010	Pemprov, Pemkab, PSEKP, Perbankan

III. DUKUNGAN INSTRUMEN DAN KEBIJAKAN EKONOMIS

1. Penegakan aturan dan kepastian hukum dalam penataan ruang, kemudahan mendapatkan lahan dan perijinan usaha pengembangan sapi potong di pulau-pulau kecil	a. Terbentuknya kawasan pengembangan usaha sapi potong di pulau-pulau kecil yang berkelanjutan b. Terjaminnya keamanan usaha sapi potong c. Meningkatnya partisipasi peternak mandiri/swasta	2009-2010	Pemprov, Pemkab, Hankam
2. Kemudahan akses petani pada lembaga keuangan mikro sebagai sumber pembiayaan usaha sapi potong	Terakselerasinya perkembangan pulau-pulau kecil dan menjadi wilayah kegiatan wirausaha mandiri	2009-2010	Deptan, Pemprov, Pemkab Perbankan

3. Dukungan kebijakan investasi melalui subsidi bunga kredit komersial (6%)	Swasta/BUMN yang tertarik untuk mengembangkan usaha sapi potong sebagai penghasil bakalan	2009-2010	Swasta/BUMN Perbankan, Pemprov, Pemkab,
---	---	-----------	---

DAFTAR BACAAN

- Adiwoso, D. 2008. Menambah populasi ternak sapi potong di Indonesia. Makalah dipresentasikan pada Lokakarya Upaya Peningkatan Populasi Sapi Betina Produktif di Indonesia. Jakarta, 21 April 2008. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan bekerjasama dengan Ditjen Peternakan dan PERIPI.
- Bahri, S. 2008. Berbagai upaya meningkatkan populasi sapi potong betina produktif untuk bibit. Makalah dipresentasikan pada Lokakarya Upaya Peningkatan Populasi Sapi Betina Produktif di Indonesia. Jakarta, 21 April 2008. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan bekerjasama dengan Ditjen Peternakan dan PERIPI.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2007 Buku Statistik Peternakan. Direktorat Jenderal Peternakan, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Peternakan. 2007. Program Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi Tahun 2010 (P2SDS). Jakarta.
- Diwyanto, K. 2007. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Model Pengembangan Usaha Sapi Potong. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Inounu, I. 2007. Pemanfaatan Pulau-pulau Kecil Untuk Pengembangan Usaha Ternak Sapi Potong. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.

- Inonu, I. 2006. Rencana Tindak Program Menuju Kecukupan Daging Sapi Tahun 2010. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor.
- Malole, M. 2008. Peluang dan tantangan impor sapi bibit dari negara-negara lain sebagai alternatif pemenuhan ketersediaan sapi potong. Makalah dipresentasikan pada Lokakarya Upaya Peningkatan Populasi Sapi Betina Produktif di Indonesia. Jakarta, 21 April 2008. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan bekerjasama dengan Ditjen Peternakan dan PERIPI.
- Tawaf, R. 2008. Peluang bisnis tunda potong melalui pola kemitraan usaha. Makalah dipresentasikan pada Lokakarya Upaya Peningkatan Populasi Sapi Betina Produktif di Indonesia. Jakarta, 21 April 2008. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan bekerjasama dengan Ditjen Peternakan dan PERIPI.

TIM PERUMUS

1. Prof. (R) Dr. Kusuma Diwyanto – Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
2. Prof. (R) Dr. Sjamsul Bahri – Sekretaris Direktorat Jenderal, Jakarta
3. Prof. (R) Dr. Subandriyo – Balai Penelitian Ternak, Ciawi – Bogor
4. Prof. Dr. Ir. Harimurti Martojo – Fakultas Peternakan, Institut Pertanian Bogor
5. Dr. Abdullah M. Bamualim – Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
6. Dr. Ismeth Inounu – Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
7. Dr. Budi Haryanto - Balai Penelitian Ternak, Ciawi – Bogor
8. Ir. Dicky Adiwoso, MBA – Pengusaha sapi potong
9. Dr. M. Malole – Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor
10. Ir. Rochadi Tawaf, MS. – Fakultas Peternakan Universitas Pajajaran / Sekjen PPSKI
11. Dr. Drh. Hasim, DEA – Dekan Fakultas MIPA, Institut Pertanian Bogor
12. Dr. Eny Martindah – Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
13. Dr. Atien Priyanti – Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor
14. Ratna A. Saptati, MS. - Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Bogor

LAMPIRAN

BERBAGAI UPAYA MENINGKATKAN POPULASI SAPI BETINA PRODUKTIF UNTUK BIBIT

Sjamsul Bahri

Sekretaris Ditjen Peternakan, Jakarta

RINGKASAN

Selama 20 tahun terakhir (1986-2007), telah terjadi dinamika dan peningkatan populasi ternak sapi di Indonesia yang berkisar antara 9-12 juta ekor dan upaya peningkatannya. Informasi terakhir menunjukkan bahwa populasi sapi potong saat ini mencapai sekitar 10,5 juta ekor untuk memenuhi kebutuhan konsumsi daging sapi bagi 240 juta penduduk Indonesia. Dari 10,5 juta ekor sapi potong, populasi sapi betina produktif nasional hanya sebesar 3,5 juta ekor.

Distribusi sapi potong adalah 45 persen berada di Pulau Jawa dan sisanya tersebar di luar Pulau Jawa dengan total sekitar 4 juta rumah tangga peternak sapi potong. Jadi hingga saat ini, sapi lokal merupakan tulang punggung industri sapi potong yang memenuhi sekitar 72 persen kebutuhan daging sapi nasional. Kekurangan kebutuhan daging sapi dipenuhi dari impor sapi bakalan (yang selanjutnya digemukkan selama 2 – 3 bulan) dan impor daging/jerohan. Dalam tiga tahun terakhir ini impor daging dan jerohan sekitar 50 ribu ton per tahun dengan impor sapi bakalan rata-rata sekitar 380 ribu ekor per tahun. Pada tahun 2007 impor daging dan jerohan menduduki urutan tertinggi, yakni sebanyak 60 ribu ton.

Upaya peningkatan populasi telah dilakukan pemerintah (cq. Ditjen Peternakan), diantaranya adalah: (i) optimalisasi usia sapi betina produktif, (ii) menjaga agar sapi betina produktif tidak dipotong (saat ini tingkat pemotongan sapi betina produktif mencapai 150-200 ribu ekor per tahun), (iii) melakukan distribusi SBP antar pulau, (iv) intensifikasi kawin alam, (v) intensifikasi IB dan semen *sexing*, serta (vi) memanfaatkan sapi betina eks impor *Brahman cross* betina produktif.

Diperlukan upaya terobosan dalam peningkatan SBP yaitu impor sapi betina produktif untuk *breeding* yang akan dikembangkan pada pulau-pulau kecil atau dibagikan kepada rakyat yang masih memungkinkan. Hal ini perlu disertai dengan pengadaan skim pembiayaan bagi swasta untuk melakukan kegiatan *breeding* tersebut di pulau-pulau kecil.

MENAMBAH POPULASI TERNAK SAPI POTONG DI INDONESIA

Dicky Adiwoso

Pengusaha Sapi Potong, Jakarta

RINGKASAN

Fluktuasi ekonomi yang terjadi di Australia dari tahun ke tahun sejak tahun 1990 sampai tahun 2007 memberikan peluang dalam industri sapi di Indonesia. Keunggulan kompetitif dan komparatif yang dimiliki Australia dalam pengadaan sapi potong telah membuka pengusaha Australia untuk ikut serta investasi di Indonesia yaitu di Lampung pada program *breeding* sapi.

Pembelian sapi paling tepat adalah awal musim kering di Australia yaitu sekitar bulan April-Mei. Apabila pembelian dilakukan pada bulan Oktober maka harga akan mahal, karena peternak Australia bersamaan dengan kondisi yang ada di Indonesia yang juga melakukan pembelian untuk beternak selama musim semi, di mana rumput akan tumbuh, sehingga harga sapi melambung. Sapi Australia dipelihara secara bebas di padang rumput yang sangat luas dengan kawin alam, tanpa IB apalagi embryo transfer (ET). Untuk 600 ekor sapi diperlukan lahan sekitar 20 ribu ha dengan klasifikasi lahan marginal.

Australia akan senang apabila Indonesia mau membeli sapi pada bulan April-Mei setiap tahun, karena rumput disana kering. Indonesia akan mengalami persaingan ketika Australia juga membuka ekspor ke negara lain. Sapi yang di jual ke Indonesia akan terus dilakukan selama Australia tidak memiliki daya dukung pakan atau kurang menguntungkan secara

ekonomi. Jadi suatu saat apabila permintaan terhadap sapi betina produktif dari negara lain meningkat, maka Indonesia akan menghadapi masalah.

Di Indonesia sapi yang diseleksi (umur 18 bulan) akan dikirim ke Lampung untuk dipelihara selama (100-120) hari, sebelum dibagikan ke peternak sebagai plasma untuk kegiatan *breeding*. Apabila masa-masa tersebut terlewati, maka perusahaan akan rugi karena biaya produksi untuk pakan dan manajemen juga meningkat.

Induk sapi betina produktif memerlukan pakan dengan gizi baik diiringi dengan kualitas hijauan yang baik agar dapat bunting. Oleh karena itu persiapan infrastruktur menjadi prasyarat dalam usaha ini. Cekaman terhadap kondisi sapi yang biasa dipelihara bebas di lahan yang luas dan kawin secara alami dan akan dipelihara di kandang sempit milik petani dengan kondisi pakan yang sangat minim dan perkawinan melalui IB harus diminimalkan.

PELUANG DAN TANTANGAN IMPOR SAPI BIBIT DARI NEGARA-NEGARA LAIN SEBAGAI ALTERNATIF PEMENUHAN KETERSEDIAAN SAPI POTONG

M. Malole

Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor

RINGKASAN

Dalam rangka pencapaian swasembada daging sapi nasional sangat diperlukan penyediaan sapi bibit. Impor sapi hidup lebih beresiko daripada impor daging beku. Pada saat ini Indonesia bebas dari penyakit eksotik seperti: Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), *Rinderpest*, *Rift vallery fever*, *Contagious bovine pleuropneumonia* (CBPP), dan *Vesicular disease*. Keterbatasan negara-negara yang bebas dari penyakit tersebut membuat Indonesia perlu mencari alternatif dan strategi impor sapi bibit. Seperti diketahui bahwa Indonesia telah dinyatakan bebas dari PMK melalui SK Mentan No.260/Kpts/TN.510/5/1986 yang menyatakan Pulau Jawa/Indonesia bebas PMK. Pengakuan internasional terhadap bebasnya Indonesia dari PMK diproses selama tiga tahun (1988-1990) dengan melibatkan Institusi Internasional (ASEAN, OIE). Salah satu pertimbangan pengakuan bebasnya Indonesia dari penularan wabah PMK, antara lain bahwa kebijakan impor Indonesia sangat ketat melarang pemasukan ternak dan bahan asal ternak dari negara tertular PMK.

Ketergantungan impor sapi bibit pada satu negara pemasok sangat mengkhawatirkan. Namun, peluang impor sapi bibit dari negara-negara terkontaminasi penyakit eksotik, utamanya PMK tersebut masih dimungkinkan dengan adanya Artikel OIE nomer 2.2.10.12. Impor diperbolehkan dengan

memperhatikan:

1. Keberadaan *International Veterinary Certificate* bahwa ternak dari wilayah negara bersangkutan yang akan diekspor tidak didapati gejala klinis penyakit PMK.
2. Apabila kebijakan *stamping out* diberlakukan di negara pengekspor tersebut, maka ternak tetap harus berada di kandang sejak dilahirkan atau minimal selama 30 hari sebelum pengapalan. Apabila negara tersebut tidak memberlakukan kebijakan *stamping out*, maka minimal ternak dikandangkan selama tiga bulan sebelum pengapalan.
3. Tidak terdapat kasus PMK pada radius 10 km dari tempat dimana ternak dikandangkan.
4. Ternak diisolasi selama 30 hari sebelum dikapalkan dan harus dilakukan uji diagnostik baik secara biologi molekuler atau uji biologis dan uji serologis untuk meyakinkan bebas virus.
5. Ternak tidak terpapar berbagai sumber infeksi PMK selama transportasi sejak dari karantina sampai negara tujuan.

Setibanya di Indonesia ternak tersebut dikarantina di pulau yang terisolir, kemudian dicampur dengan hewan sentinel yang sangat peka terhadap PMK (uji biologis). Apabila dalam kurun waktu tiga bulan tidak ada kejadian PMK maka ternak tersebut dapat dinyatakan bebas dari infeksi PMK. Teknologi dan tenaga ahli untuk melakukan hal ini telah tersedia di Departemen Pertanian dan lembaga yang terkait dengan kesehatan hewan lainnya yang ada di Indonesia.

PELUANG BISNIS TUNDA POTONG MELALUI POLA KEMITRAAN USAHA

Rochadi Tawaf

*Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran, Bandung
Sekretaris Jenderal PPSKI*

RINGKASAN

Program swasembada daging sapi atau yang sering disebut dengan P2SDS pada tahun 2010 menuntut untuk terjadinya peningkatan populasi sapi potong di dalam negeri sebesar 1,55 juta ekor dari populasi saat ini yang mencapai sekitar 11,228 juta ekor. Peningkatan populasi ini dilakukan berdasarkan kontribusi usaha peternakan rakyat, pengusaha/swasta dan program pemerintah. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah (cq. Ditjen Peternakan) adalah melalui tujuh langkah operasional yang difokuskan di 18 provinsi dan dikelompokkan pada tiga daerah pengembangan berdasarkan potensi sumberdaya (lahan, ternak, SDM dan teknologi), sarana pendukung, pola budidaya dan ketersediaan pasar hewan.

Hasil evaluasi terhadap tujuh langkah operasional tersebut menimbulkan beberapa pertanyaan, diantaranya: (i) optimalisasi akseptor dan kelahiran IB/InKa sangat sulit dicapai dengan asumsi *calving rate* sebesar 70 persen yang pada kenyataan di lapang hanya mencapai 60 persen pada periode 2003-2007, (ii) pengembangan RPH dan pengendalian pemotongan SBP belum memiliki pola yang jelas, (iii) perbaikan mutu dan penyediaan bibit sapi selain belum memiliki arah

pengembangan yang jelas, juga tidak hanya berasal dari sapi *crossbred*, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi sapi lokal yang dimiliki, seperti sapi Bali, serta hal-hal lain terkait dengan penanganan gangguan reproduksi/kesehatan hewan, InKa, pengembangan pakan lokal melalui penerapan sistem integrasi serta pengembangan SDM dan kelembagaan.

Salah satu program yang diusulkan adalah model kerjasama pengembangan sapi potong melalui pola tunda potong yang melibatkan perusahaan *feedlotter*, usaha pembesaran, koperasi swasta dan peternak. Peran dan bantuan akses terhadap pembiayaan dan koordinasi serta kerjasama yang baik sangat diperlukan untuk terlaksananya program ini dengan baik. Model kerjasama pola embryo transfer juga diusulkan dengan jaminan keberhasilan bunting sebesar 50 persen. Embryo harus berasal dari kualitas sapi yang tercatat dan peluang kelahiran sapi betina lebih dari 85 persen.

PEMBAHASAN UPAYA PENINGKATAN POPULASI SAPI BETINA PRODUKTIF DI INDONESIA (1)

Harimurti Martojo

Fakultas Peternakan Institut Peternakan Bogor

Mindset bahwa penyediaan daging, susu, telur adalah tugas Departemen Pertanian (cq Ditjen Peternakan) perlu direnungkan kembali dan dikembalikan kepada proporsi yang tepat, yaitu bahwa tugas tersebut tidak mungkin dilaksanakan sendiri. Dari sudut pandang agribisnis maupun peternakan rakyat, terlihat adanya peranan subsistem atau segmen-segmen dalam proses produksi yang berperanan sebagai pendukung dan atau penyangga yang menentukan berjalannya proses produksi berada dalam yurisdiksi departemen lain diluar Departemen Pertanian. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya keterpaduan lintas departemen bahkan lintas direktorat didalam Direktorat Jenderal Peternakan.

Jumlah SBP yang sebagian besar merupakan peternakan rakyat sangat tergantung kepada daya dukung tenaga kerja keluarga dan lingkungan pedesaan-nya (Jawa, Bali, Lampung) dan daya tampung padang penggembalaan (NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dlsb yang semakin sempit karena terserang gulma atau perkebunan Kelapa sawit). Upaya perbaikan lingkungan perlu mendahului atau diserentakkan dengan usaha peningkatan jumlah/populasi SBP. Pelarangan pemotongan ternak betina ternyata mempunyai efek negatif terhadap SBP, karena sulit dijual (harus melanggar peraturan) maka harganya menjadi lebih rendah dibandingkan hewan jantan. Karena hewan jantan umur potong sebagian besar dikeluarkan/dijual dari daerah sumber bibit, maka terjadi defisit pejantan dan defisit ternak potong

jantan untuk supply daging di wilayah bersangkutan, akibatnya SBP jadi satu-satunya sumber daging, dan terpaksa dipotong secara ilegal.

Penjaringan/pembelian oleh Dinas Peternakan terhadap SBP sebagai tindakan penyelamatan induk (dan embrio/janin) akhir-akhir ini di RPH, pelabuhan, pasar, dlsb ternyata berdampak positif terhadap harga SBP, dimana harganya meningkat. Namun perlu disadari bahwa penjaringan/pembelian dengan harga yang menarik ini akan menimbulkan aliran keras SBP dari perdesaan dan memberi kesan bahwa pelanggaran peraturan pelarangan pemotongan SBP, termasuk izin penjualan/pengeluaran dari desa asal, boleh dilanggar bahkan seolah-olah pemerintah justru menjadi penampungnya. Penjaringan yang bersifat aksi darurat/ sementara ini baru merupakan penyelamatan SBP dari pemotongan. Belum lagi tindaklanjutnya yang masih panjang dan berat berupa distribusi kembali ke perdesaan, atau pembentukan kelompok peternak pembibit yang perlu diseleksi dengan teliti. Hal ini perlu mempertimbangkan juga wilayah yang belum tentu sanggup menampungnya mengingat daya tampung lingkungan dan peternaknya (SDM) yang sudah memanfaatkannya secara maksimal.

Perlu disadari bahwa terjadi surplus SBP di tingkat peternakan rakyat karena *replacement rate* yang diduga rendah (dan terus menurun) karena terbatasnya atau menurunnya daya tampung lingkungan (yang makin sempit atau kualitasnya juga turun) dengan kemampuan memelihara rata-rata sekitar 2 ekor. SBP surplus ini kalau tidak disalurkan keluar, hanya akan membebani lingkungan perdesaan, karena tidak tertampung lagi oleh peternak dan lingkungan. Karena itu apabila akan mengusahakan agar SBP tetap ada di perdesaan dan memproduksi menghasilkan pedet, diperlukan juga upaya peningkatan daya tampung lingkungan dan keluarga peternak perlu dipergiat.

Mindset bahwa jumlah populasi yang terpenting untuk ditingkatkan dalam upaya peningkatan produksi daging, mengakibatkan bahwa kita sampai-sampai mencoba dengan memanfaatkan sapi betina BX yang diduga kuat adalah hasil *culling* di peternakan cow calf operation (CCO) di Australia yang diantaranya memang masih dapat bunting tapi telah terindikasi bermasalah dalam reproduksinya. Padahal selain meningkatkan jumlah SBP dapat juga meningkatkan daya reproduksi populasi SBP dengan menyingkirkan sapi betina majir dan tua yang sudah rendah daya reproduksinya. Hal ini akan mengakibatkan sapi yang tersisa dapat menunjukkan persentase kelahiran/beranak yang meningkat, dimana dalam hal ini jumlah dan kualitas para tenaga pemeriksa kebuntingan harus ditingkatkan.

Perlu adanya pemikiran kembali mengenai manfaat keberadaan suatu UU pelarangan pemotongan karena selama ini kurang efektif dan lebih berdampak pada turunnya harga SBP dan akhirnya dipotong secara gelap. Karena fokus terhadap jumlah SBP yang harus meningkat secara instan, kita sampai-sampai menganggap pemindahan SBP dari satu kawasan ke kawasan lain dalam satu wilayah sama, tidak bermanfaat dalam upaya meningkatkan jumlah populasi dan produksi daging. Padahal kalau pemindahan dikaitkan dengan pembukaan daerah baru yang berdaya tampung tinggi hanya dengan sedikit kesabaran, waktu akan menunjukkan bahwa kelompok SBP yang dipindahkan ini akan beranak dan anak-anak ini adalah hasil dari upaya pengembangan jumlah populasi. Mungkin usul ini akan sulit diterima saat ini tetapi mari kita renungkan apakah cara/pendekatan baru ini tidak lebih bermanfaat dalam jangka panjang. Pendekatan baru untuk mengukur keberhasilan usaha dalam meningkatkan produksi daging, bukan didasarkan pada hanya jumlah produksi daging saja, tetapi jumlah daging yang diproduksi per satuan unit kelompok peternak rakyat (termasuk sapi, luas dan daya tampung arealnya).

Perlu dipertimbangkan pengaturan jumlah usaha "penggemukan"/pembesaran ternak sapi jantan yang harus dikaitkan dengan daya reproduksi optimal kelompok SBP disuatu wilayah dalam menghasilkan bakalan. Peraturan ini harus diberlakukan lintas departemen yang ikut mengusahakan/mendukung/mendanai usaha penggemukan tersebut. Peningkatan jumlah SBP hendaknya dikaitkan dengan peningkatan jumlah peternakan penghasil anak (CCO) baik yang berbentuk peternakan rakyat maupun peternakan komersial.

PEMBAHASAN UPAYA PENINGKATAN POPULASI SAPI BETINA PRODUKTIF DI INDONESIA (2)

Hasim

Fakultas MIPA, Institut Peternakan Bogor

Swasembada daging merupakan program yang sudah tepat. Dalam rangka swasembada daging nasional perlu usaha terobosan peningkatan SBP. Upaya lain telah lengkap diuraikan oleh Sekretaris Ditjen Peternakan, namun belum mampu mendongkrak populasi SBP dengan signifikan. Selama ini impor dari Australia, peluang dan tantangan impor dari Australia juga telah diterangkan dengan baik. Peluang impor dari negara tidak bebas penyakit terutama PMK juga telah dimungkinkan dengan tahapan-tahapannya.

Tinjauan Politik : Usaha bangsa yang maju adalah bangsa yang dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya terhadap pangan, papan, sandang, perumahan, sampai pendidikan yang berkualitas. Kesenambungan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas fisik dan mental penduduknya. Secara politik kemandirian pangan sangat menentukan kemerdekaan suatu negara atas bangsa lain. Oleh karena itu, jika dalam rangka pemenuhan protein hewani asal sapi negara Indonesai masih impor sebanyak 70 persen dari kebutuhan nasional, usaha-usaha untuk swasembada adalah usaha yang sangat tepat. Peningkatan produksi daging merupakan hal yang sangat urgen, karena disamping pemenuhan gizi masyarakat juga sekaligus penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan sumberdaya alam yang belum tergarap. Oleh karena itu sangat ganjil apabila bangsa yang berkekayaan alam sangat potensial, dan tenaga kerja pengangguran yang tinggi, masih terus mengimpor daging sapi beku dari luar negeri.

Tinjauan Ekonomi : Harga daging beku di luar negeri memang seringkali lebih murah dibandingkan dengan daging lokal. Hal ini disebabkan karena terjadinya *over supply*. Namun apabila dipenuhi terus dengan barang-barang siap konsumsi akan menciptakan pengangguran dan tidak termanfaatkannya sumberdaya lahan. Disamping itu apabila negara menghadapi masalah politik luar negeri, atau terjadi peningkatan harga dunia, maka kebijakan impor sangat merugikan ekonomi bangsa dan politik bangsa secara keseluruhan.

Kebutuhan daging sapi dari tahun ke tahun akan terus meningkat. Diperkirakan tahun 2010 konsumsi daging Indonesia akan mencapai 414,317 ribu ton, jika hanya impor 9,8 persen daging atau sapi bakalan, maka dalam negeri harus mampu mensuplai daging 373,7 ribu ton, itupun dengan asumsi konsumsi daging sapi per kapita stabil sebesar 1,6 kg tahun (tidak ada kenaikan taraf hidup). Pemenuhan dari impor 9,8 persen adalah 40,6 ribu ton yang dapat dipenuhi dari sapi bakal atau impor daging beku (definisi swasembada adalah produksi dalam negeri 90 persen, kurang atau sama dengan 10 persen masih impor)

Kondisi pada tahun 2007, di dalam negeri hanya dapat menyediakan daging 245,2 ribu ton, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan nasional adalah 385 ribu ton. Tahun 2007 masih impor 139,8 ribu ton (36 persen). Sehingga, apabila pada tahun 2010 produksi di dalam negeri ingin menjadi 373,7 ribu ton, terjadi kekurangan sebanyak 128,5 ribu ton. Jika tanpa program percepatan, diperkirakan tahun 2010 hanya dapat mencapai 259,2 ton, atau hanya tambah 14 ribu ton. Hal ini mengindikasikan bahwa tugas percepatan harus mampu meningkatkan 114,5 atau 115 ribu ton daging dalam 3 tahun yang akan datang. Oleh karena itu, untuk mencapai swasembada daging tahun 2010 diperlukan peningkatan populasi dari 10,5 juta ekor sapi menjadi 12,5 juta ekor.

Swasembada daging, jika tanpa penambahan sapi impor betina produktif dari luar negeri, sangat sulit tercapai untuk dapat mencapai target tahun 2010. Jadi pemerintah harus mendorong lahirnya *breeding farm* profesional di dalam negeri, dimana anak sapi bakalan akan dijual kepada masyarakat melalui koperasi. Jika memang swasta enggan melakukannya, maka pemerintah harus membuat *breeding farm* milik negara, dimana dapat memanfaatkan pulau-pulau kecil dan membuka lapangan kerja baru bagi alumni peternakan dan kedokteran hewan, dimana saat ini banyak yang bekerja tidak pada bidang peternakan. Jika demikian maka pemerintah dapat melaksanakan impor sapi betina produktif dari mana saja dengan mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.

Disamping pembuatan *breeding farm* untuk sapi potong, pemerintah tetap mengoptimalkan pembinaan *breeding* oleh petani peternak yang selama ini terus berjalan, yang telah terbukti mampu mensuplai 70 persen kebutuhan nasional. Swasta selama ini ternyata baru mampu membantu pemerintah dalam pengadaan SBP dan impor sapi bakalan untuk digemukan selama 2-3 bulan, serta impor daging beku dan jerohan, tetapi masih sangat berhitung untuk mengelola *breeding farm* sapi potong.

Tinjauan Sosial budaya: Secara sosial, ketika sapi bakalan telah hadir di dalam negeri, adalah pendistribusian semaksimal mungkin kepada petani peternak melalui kelembagaan koperasi yang sehat untuk peternak sapi potong. Penambahan petani melalui konversi atau penambahan pekerjaan disamping petani sawah memerlukan pelatihan dan perhatian khusus, dimana pembinaannya dilakukan oleh koperasi. Apabila mereka sanggup memelihara SBP harus betul-betul mampu melahirkan anak sapi bakalan untuk sapi potong. Kelembagaan atau koperasi peternak sapi potong adalah mutlak untuk menuju swasembada daging. Dengan penambahan populasi sapi potong, maka harus ada manajemen untuk

pengadaan hijauan yang cukup dan berkelanjutan, manajemen kesehatan, dan pemasaran yang adil.

Diperlukan adanya *blue print* berisikan hasil kajian hingga tahapan kerja, serta model-model pemeliharaan secara mendalam terkait dengan lintas departemen dan daerah sehubungan dengan otonomi daerah. Agar tahapan-tahapan yang sudah digariskan dapat terlaksana, yaitu untuk pencapaian secara reguler: (i) Optimalisasi akseptor dan kelahiran IB, (ii) Pengembangan RPH dan pengendalian pemotongan SBP, (iii) Perbaikan Mutu dan penyediaan bibit, (iv) Penanganan gangguan reproduksi/kesehatan hewan, (v) Intensifikasi kawin alam, (vi) Pengembangan pakan lokal, dan (vii) Pengembangan SDM dan kelembagaan. Untuk program terobosan dalam pembangunan *breeding farm* baik milik negara maupun oleh swasta juga harus dibuat aturan mainnya. Mulai dari seleksi pulau-pulau kecil yang memungkinkan, bukan sekedar kata dan wacana, namun telah disurvei secara mendalam sebelum sapi impor tiba di Indonesia.

Program *breeding* sangat diperlukan dan sebaiknya ditangani oleh negara. Apalagi apabila swasta tidak ada yang sanggup, dan andaikata sanggup dikhawatirkan akan sangat komersial sehingga sangat merugikan petani peternak. Hal ini pada akhirnya harga daging di tangan konsumen tetap tidak terjangkau, sehingga sasaran pemenuhan gizi masyarakat serta negara kuat tidak tercapai. *Breeding farm* milik negara akan berhasil apabila dikelola oleh SDM yang berkualitas.

Kajian pulau-pulau kecil harus segera diperdalam hingga jelas di pulau mana dengan seluruh argumen yang menyangkut sumberdaya lahan, sosial, kelembagaan, kultur masyarakat, kejadian penyakit dan sebagainya hal-hal yang mendukung bagi kehidupan sapi yang baik dan sehat.